

TATA KELOLA KETERSEDIAAN AIR BERSIH PDAM WAY SEKAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU

Ulfa Umayasari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: ulfaumayasari@fisip.unila.ac.id

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v4i3.603](https://doi.org/10.53866/jimi.v4i3.603)

Abstract

Clean water management is a strategic issue in regional development, including in Pringsewu Regency. This research aims to analyze the clean water management system, identify the main challenges, and formulate strategies for improving clean water services in the region. The research approach uses qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, field observations and document studies. Data were analyzed using an interactive model with a focus on policy, institutional and community participation aspects. The research results show that clean water management in Pringsewu Regency still faces various obstacles, such as limited infrastructure, low community access to clean water, and lack of optimal coordination between stakeholders. From an institutional perspective, coordination between regional governments, Regional Owned Enterprises (BUMD), and the community needs to be improved to create a sustainable system. The proposed strategy includes strengthening regulations and clean water management policies, increasing infrastructure capacity through sustainable investment, and empowering communities in managing water resources. Technology-based approaches are also recommended to improve the efficiency of distribution systems and water quality monitoring. It is hoped that this research can become a reference in policy making to ensure equal, sustainable and quality access to clean water in Pringsewu Regency.

Keywords: *Clean Water, Availability, Governance.*

Abstrak

Tata kelola air bersih menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan air bersih, mengidentifikasi tantangan utama, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan air bersih di wilayah tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif dengan fokus pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola air bersih di Kabupaten Pringsewu masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih, dan belum optimalnya koordinasi antar pemangku

Hlm | 168

www.journal.das-institute.com

kepentingan. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan regulasi dan kebijakan tata kelola air bersih, peningkatan kapasitas infrastruktur melalui investasi berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Pendekatan berbasis teknologi juga direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan monitoring kualitas air. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan untuk memastikan akses air bersih yang merata, berkelanjutan, dan berkualitas di Kabupaten Pringsewu.

Kata kunci : *Air Bersih, Ketersediaan, Tata Kelola.*

1. Pendahuluan

Dewasa ini penelitian tentang pengelolaan air bersih mulai beralih ke konsep water governance. Meskipun demikian, penggunaan konsep water governance dalam banyak penelitian bersifat sangat situasional. Masalah water governance yang paling strategis berada di negara berkembang dan sering menderita masalah hidrologi yang buruk yakni sering mengalami kebanjiran, kekeringan, tingginya angka ketidakpastian sumber air, ketergantungan pada pertanian, irigasi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga kebutuhan air juga meningkat. Kecilnya prioritas infrastruktur untuk pengelolaan air, kelembagaan publik pengelola sumber daya air yang rapuh dan menghadapi lebih banyak ketidakpastian yang timbul dari perubahan iklim. Hasilnya, lebih banyak ketidakamanan sumber daya air terutama di negara-negara miskin dan negara berkembang.

Pentingnya keberadaan air yang berpengaruh pada segala aspek dalam kehidupan manusia, membuat pengelolaan air menjadi isu global yang akan terus diperbincangkan. Air sebagai materi esensial dalam kehidupan manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh semua kalangan yang mampu mengakibatkan persaingan ekonomi dan konflik sosial karena pemenuhannya. Oleh karenanya pengelolaan kebutuhan air tidak semata ditinjau dari aspek ekonomi tapi bagaimana air dikelola dengan prinsip lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dengan praktik pengambilan kebijakan yang berlandaskan kelestarian lingkungan dan keadilan distribusi (Kusumah dan Mustofa, 2020:33-34).

Istilah water governance atau “tata kelola air” perlu didefinisikan dengan hati-hati. Penting juga untuk mengidentifikasi indikator yang membuat tata kelola air “efektif”. Global Water Partnership mendefinisikan tata kelola air sebagai tata kelola air yang mengacu pada berbagai sistem politik, sosial, ekonomi dan administrasi yang ada untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air, dan pemberian layanan air, di berbagai tingkat masyarakat. Mencakup kemampuan untuk merancang kebijakan publik dan kerangka kelembagaan yang diterima secara sosial dan memobilisasi sumber daya sosial untuk mendukungnya.

Kebijakan air dan proses perumusannya harus memiliki tujuan untuk pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan, dan agar implementasinya efektif, para pelaku atau pemangku kepentingan utama harus dilibatkan dalam proses tersebut. Aspek tata kelola cenderung bersifat tumpang tindih dengan aspek teknis dan ekonomi air, tetapi pemerintah mengarahkan kita pada elemen politik dan administratif untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang.

Tata kelola air adalah bagian dari masalah yang lebih umum dari penciptaan infrastruktur fisik dan Hlm | 169

kelembagaan suatu negara dan dari masalah kerjasama sosial yang lebih umum. Tata kelola air berkaitan dengan organisasi dan lembaga politik, sosial dan ekonomi yang penting untuk pengembangan dan pengelolaan air. Mengingat kompleksitas penggunaan air dalam masyarakat, mengembangkan mengalokasikan dan mengelolanya secara adil dan efisien serta memastikan kelestarian lingkungan mensyaratkan bahwa suara yang berbeda patut didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan atas akses air dan penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas (Rogers dan Hall, 2003:16).

Ada persepsi yang berkembang bahwa tata kelola sumber daya air dan layanan air berfungsi lebih efektif dengan struktur sosial terbuka yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil, perusahaan swasta dan media, semua jaringan untuk mendukung dan mempengaruhi pemerintah. Selain itu, memeriksa peran jaringan atau tata kelola terdistribusi membantu mengatasi perdebatan steril tentang penyampaian layanan air swasta versus publik dan peran masyarakat. Tujuan dari terciptanya sistem pemerintahan yang tepat memberikan fokus yang lebih praktis. Peran masyarakat sipil dan LSM dalam pengelolaan air dan pelayanan juga menjadi lebih jelas karena peraturan pemerintah memfasilitasi pemerintahan sendiri.

2. Metode Penelitian

2.1. Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tata kelola air bersih di Kabupaten Pringsewu, dengan subjek penelitian meliputi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola air bersih, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan air bersih. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang mencakup tahapan pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan. Lokasi penelitian terpusat di wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu, mencakup area perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik akses air bersih yang berbeda. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi masalah tata kelola air bersih yang menjadi perhatian strategis pemerintah daerah..

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama:

1. Wawancara Mendalam: Digunakan untuk menggali informasi dari subjek penelitian, seperti pejabat pemerintah, manajemen BUMD, tokoh masyarakat, dan warga. Pertanyaan diarahkan untuk memahami kondisi tata kelola, tantangan yang dihadapi, dan usulan solusi.
2. Observasi Lapangan: Dilakukan dengan mengamati langsung kondisi infrastruktur air bersih, seperti jaringan distribusi, fasilitas pengolahan, dan sumber air, untuk memahami permasalahan teknis yang ada.
3. Studi Dokumen: Meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan tahunan, peraturan daerah, dan data statistik untuk melengkapi informasi dari wawancara dan observasi.

2.3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan model analisis interaktif. Proses analisis meliputi tiga tahapan utama: reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk mempermudah pemahaman, dan penarikan kesimpulan untuk merumuskan rekomendasi strategis. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan

validitas temuan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, sehingga analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi nyata tata kelola air bersih di Kabupaten Pringsewu.

3. Hasil dan Pembahasan

Masalah water governance yang paling strategis berada di negara berkembang dan sering menderita masalah hidrologi yang buruk yakni sering banjir dan kekeringan, tingginya angka ketidakpastian sumber air, ketergantungan pada pertanian dan irigasi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan karenanya kebutuhan air juga meningkat, kecilnya prioritas infrastruktur untuk pengelolaan air, kelembagaan publik pengelola sumber daya air yang rapuh dan menghadapi lebih banyak ketidakpastian yang timbul dari perubahan iklim. Hasilnya, lebih banyak ketidakamanan sumber daya air terutama di negara-negara miskin dan negara berkembang.

Pentingnya keberadaan air yang berpengaruh pada segala aspek dalam kehidupan manusia, membuat pengelolaan air menjadi isu global yang akan terus diperbincangkan. Air sebagai materi esensial dalam kehidupan manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh semua kalangan yang mampu mengakibatkan persaingan ekonomi dan konflik sosial karena pemenuhannya. Oleh karenanya pengelolaan kebutuhan air tidak semata ditinjau dari aspek ekonomi tapi bagaimana air dikelola dengan prinsip lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dengan praktik pengambilan kebijakan yang berlandaskan kelestarian lingkungan dan keadilan distribusi (Kusumah dan Mustofa, 2020:33-34). Tata Kelola ketersediaan air bersih dapat ditelaah melalui beberapa aspek di bawah ini :

1. Pendekatan

a. Terbuka dan Transparan

Lembaga penyedia air bersih harus bekerja secara terbuka. PDAM dalam hal ini harus dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum untuk meningkatkan kepercayaan pada lembaga. Selain terbuka, tata kelola yang baik mensyaratkan semua keputusan kebijakan transparan baik perihal pembayaran fasilitas air bersih sehingga baik pihak dalam maupun luar dapat dengan mudah mengikuti langkah-langkah yang diambil dalam perumusan kebijakan. Ini sangat penting terkait dengan transaksi keuangan. Seperti yang diungkapkan Rini Andalusia Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu :

“Awal saya masuk kondisi carut-marut. Sumber daya manusia keteteran dengan sistem online. Pelan-pelan tidak mungkin harus selamanya manual. Tidak bisa bohongin saya. Kalau masih mau menagih manual tidak tau berapa yang masuk kantong. Kami kerjasama dengan server PDAM Bandung dan Perpamsi. Dan kerjasama Pesawaran untuk e-billing. Ketika kita ingin mengubah sistem pasti ada yang terganggu akan kehilangan sumber yang biasa bawa tagihan. Dulu tagihan dibawa disetor kekita kapan tidak tau. Saya ingin menyelamatkan uang saya. Maka saya cari sistem terpantau dalam hp. Ada perdebatan ada yang mau dan tidak mau. Karena saya sendiri mereka berkoloni.

Penting dalam merancang sistem tata kelola yang efektif, biaya transaksi tidak dinaikkan secara

berlebihan dan tindakan tidak dibatasi. Selalu ada *trade-off* dan penting untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat untuk setiap situasi daripada mencari sistem yang ideal. Di masa depan, sistem tata kelola seringkali sulit dan dapat menghambat pembangunan, tetapi sifat keterbukaan masyarakat menuntut tingkat tata kelola ini (Rogers dan Hall, 2003:26-27).

PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu adalah lembaga pengelola ketersediaan air minum yang baru berdiri pada 25 Juli 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu No. 19 Tahun 2011. Sejak tanggal terbentuknya hingga saat ini, bisa dikatakan PDAM Way Sekampung belum berproduksi optimal. Beberapa uji coba pengaliran memang sudah dilakukan. PDAM Way Sekampung saat ini masih mengalami kesulitan dana untuk biaya operasional Intake dan IPA. Dari kondisi di atas, belum banyak yang bisa diuraikan dari aspek keuangan karena laporan neraca keuangan PDAM juga belum ada. Tabel berikut menggambarkan Kinerja PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu oleh BPSPAM.

Tabel 1. Kinerja PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

PDAM Kab. Pringsewu						
TABEL KATEGORI KINERJA						
	2015		2016		2017	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-3,46%	1	-4,70%	1	-4,15%	1
b. Ratio Operasi	1,35	1	1,39	1	1,30	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	221,03%	5	8,78%	1	32,29%	1
b. Efektivitas Penagihan	97,85%	5	100,73%	5	98,77%	5
3. Solvabilitas	39531,54%	5	19298,03%	5	15110,81%	5
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan	0,81		0,59		0,59	
B. PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	9,88%	1	11,27%	1	9,43%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	0,00%	1	17,01%	5	7,62%	3
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	27,06%	2	39,45%	2	78,23%	4
4. Kualitas Air Pelanggan	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	1
5. Konsumsi Air Domestik	14,08	1	13,40	1	13,55	1
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan	0,28		0,48		0,43	
C. OPERASI						
1. Efisiensi Produksi	23,26%	1	27,39%	1	31,91%	1
2. Tingkat Kehilangan air	45,93%	1	48,60%	1	52,38%	1
3. Jam Operasi Layanan / hari	7	1	7	1	6	1
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	1
5. Penggantian Meter Air	2,05%	1	2,80%	1	0,76%	1
Bobot Kinerja - Bidang Operasi	0,35		0,35		0,35	
D. SDM						
1. Rasio jumlah pegawai/1000 plg	19,90	1	17,55	1	15,80	1
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi	3,23%	1	0,00%	1	0,00%	1
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0,22%	1	0,00%	1	0,00%	1
Bobot Kinerja - Bidang SDM	0,15		0,15		0,15	
TOTAL NILAI KINERJA	1,59		1,57		1,52	
KATEGORI	SAKIT		SAKIT		SAKIT	
INFORMASI TAMBAHAN						
1. Tarif rata-rata (Rp/m ³)	3.960	17. Biaya Energi (Rp/m ³)	735			
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m ³)	2.973	18. Biaya pemeliharaan (Rp/m ³)	-			
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m ³)	4.995	19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)	51%			
4. HPP Diluar Depresiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m ³)	3.705	20. Kapasitas Terpasang (L/det)	75			
5. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Standar)	987	21. Volume Produksi Riil (L/det)	24			
6. Selisih (tarif rata ² - HPP dengan NRW Riil)	(1.035)	22. Panjang Pipa Transmisi (m)	1.000			
7. Selisih (tarif rata ² - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga)	255	23. Panjang Pipa Distribusi (m)	255.428			
8. Total Aset Tetap (Rp. 000)	7.887.450	24. Volume Reservoir (m ³)	1.500			
9. Total Aset (Rp. 000)	10.482.512	25. Jumlah Pelanggan (Unit SL)	1.962			
10. Hutang Lancar (Rp. 000)	69.371	26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi (Jiwa)	390.486			
11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)	-	27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa)	106.143			
12. Total Equity (Rp. 000)	10.413.141	28. Penduduk Terlayani (jiwa)	10.010			
13. Laba Bersih Setelah Pajak (Rp. 000)	(432.110)	29. Jumlah Pegawai (orang)	31			
14. Total Pendapatan (Rp.000)	1.376.653	30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan)	1.634.352			
15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR)	5.342.768	31. Periode Business Plan (Tahun)	-			
16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m ³)	118					

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Kondisi PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu yang masuk dalam kategori “sakit” mendapat pengakuan dari Rini Andalusia, Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu:

“Ada penilaian BPKP dilakukan satu tahun sekali. Dilihat dari jumlah pelanggan, daerah pelayanan, kepegawaian atau SDM, produksi, jam pelayanan, jumlah karyawan. Ada aturan idealnya per 1000 pelanggan itu harusnya ada 8 karyawan. Sebetulnya kami kelebihan karyawan. Kita dapat warisan karyawan dari Tanggamus. Kita seharusnya ada seleksi karyawan sesuai kebutuhan, tapi kita sifatnya menerima saja jadi kita optimalkan karyawan yang ada. Harusnya kami 16 atau 20 tapi kami kelebihan 10 orang”.

Pernyataan Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Rini Andalusia di atas menjadi pendukung atas transparansi yang selama ini sulit dilakukan di internal sumber daya PDAM yang ‘gemuk’ dan tidak ideal berdasarkan perhitungan jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang saat ini ada dan belum memenuhi target. Tidak hanya itu, kenakalan oknum di lapangan yang dulu saat melakukan penarikan tarif PDAM masih bersifat manual kerap dikeluhkan pelanggan karena terdapat biaya tambahan diluar dari harga yang dibayarkan dan Rini Andalusia menyatakan mungkin masuk dalam kantong pribadi oknum yang bersangkutan. Sehingga transparansi dan keterbukaan mulai dijalankan di era kepemimpinannya.

b. Inklusif dan Komunikatif

Kualitas, relevansi, dan efektivitas kebijakan pemerintah bergantung pada kepastian partisipasi yang luas di seluruh rantai kebijakan dari konsepsi hingga implementasi. Partisipasi yang lebih baik kemungkinan besar akan menciptakan kepercayaan yang lebih besar pada hasil akhir dan pada lembaga yang mengeluarkan kebijakan. Partisipasi sangat bergantung pada semua tingkat pemerintahan mengikuti pendekatan inklusif ketika mengembangkan dan melaksanakan kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dibangun di atas arus informasi yang bebas. Lembaga dan sistem tata kelola perlu berkomunikasi di antara para pelaku dan pemangku kepentingan dengan cara langsung. Jika dilakukan dengan benar, hal ini akan membuat masyarakat dan pemerintahan saling berinteraksi.

Langkah-Langkah yang dilaksanakan untuk optimalisasi pelayanan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

1. Usulan optimalisasi sistem yang melalui Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Air Minum, Satker PSPAM Provinsi Lampung
2. Menambah dan memperbaiki jaringan di semua jalur pipa
3. Menambah dan memperbaiki sambungan rumah
4. Efisiensi dan efektifitas pengolahan
5. Upaya penambahan SR melalui bulan promosi dengan menurunkan BP (Biaya Penyambungan)
6. Menambah daerah layanan ke arah Kec. Gadingrejo.

Deskripsi di atas adalah janji program PDAM yang Peneliti dapatkan dalam data sekunder laporan tahunan PDAM kepada *stakeholder* terkait guna memperbaiki akses air bersih di Kabupaten Pringsewu. Seiring dengan ungkapan Rini Andalusia selaku Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu :

“Karena air pelayanan dasar dan harus jadi pelan-pelan mereka mencari pelanggan. Intinya kita jualan air kalau dilihat secara, yang sarprasnya sudah difasilitasi Pemda. Kita yang mengoperasikan. Kita jualan bayar nanti. Secara logika harusnya untung air kita tidak beli. Ambil dari sungai tapi ada operasional disitu, ada pompa di situ, ada listrik di situ, ada pemakaian zat kimia disitu. Lain hal kalau sumber air gravitasi. Itu yang terjadi di lampung barat dan Pesawaran. Way pagasan gravitasi diharapkan mampu mensubsidi”.

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan komunikasi yang berusaha dibangun oleh PDAM dalam tata kelola air bersih di Kabupaten Pringsewu guna memenuhi keseluruhan pendistribusian tiap kecamatan adalah dengan membangun komunikasi beberapa pihak utamanya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang membidangi Cipta Karya khususnya dalam pengelolaan air bersih di Provinsi Lampung serta dengan beberapa PDAM yang ada di kabupaten lain seperti Pesawaran dan di Pulau Jawa.

c. Kebijakan dan Tindakan Koheren

Kebutuhan akan harmoni dan koherensi dalam tata kelola air semakin meningkat seiring dengan bertambahnya rentang tugas dan menjadi lebih beragam. Tantangan seperti perubahan iklim dan demografis melintasi batas-batas kebijakan sektoral di mana pemerintah telah dibangun. Koherensi membutuhkan kepemimpinan politik dan tanggung jawab yang kuat di pihak lembaga di berbagai tingkat untuk memastikan pendekatan yang konsisten dalam sistem yang kompleks. Tata kelola air harus meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT). Institusi tersebut harus mempertimbangkan semua penggunaan dan pengguna dalam sektor air tradisional dan juga keterkaitannya dengan dan dampaknya terhadap semua pengguna dan sektor potensial lainnya. Berbagai fakta yang terkait dengan ketersediaan air bersih yang dilakukan oleh PDAM di beberapa daerah menunjukkan permasalahan dalam hal pelayanan terutama aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas air maupun keandalan sistem ketersediaan sehingga pengelolaan layanan air bersih oleh pemerintah daerah tidak efisien dan bias (Nur dkk, 2018:43).

Berdasarkan data RI-SPAM Kabupaten Pringsewu 2020-2040, besaran tingkat kehilangan air rata-rata PDAM “Way Sekampung” diatas 50%, dan hal ini dapat dilihat pada laporan teknis PDAM. Dan ketika ditelusuri, sesungguhnya nilai yang dilaporkan PDAM, merupakan nilai yang diperhitungkan berdasarkan rekening penjualan air kepada pelanggan. Lalu jumlah volume air yang terjual, maka dihitung kembali ke volume distribusi dan produksi PDAM, setiap bulannya. Mengapa demikian, oleh karena sarana water meter induk yang ada, sudah tidak berfungsi lagi, sehingga PDAM hanya memiliki data pembacaan meter pelanggan.

Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa kegiatan penurunan kehilangan air harus menjadi

komitmen pimpinan PDAM dan pemerintah agar PDAM menjadi perusahaan air minum yang sehat. Strategi penurunan kehilangan air memiliki 4 hal yang pokok, yang harus dilakukan PDAM, yaitu manajemen tekanan, artinya PDAM harus secara rutin melakukan pengukuran tekanan pada jaringan perpipaannya. Oleh karena dengan melakukan pengukuran ini secara periodik (saat jam puncak atau saat pemakaian minimum), PDAM mengetahui, dimana wilayah-wilayah yang mendapatkan air dan tidak mendapatkan air.

1. Percepatan perbaikan kebocoran.
2. Manajemen aset yang berbasis kehilangan air.
3. Pencarian kebocoran secara aktif

Strategi ini, dimulai dengan melakukan inventarisasi aset PDAM, yaitu jaringan perpipaan dan pelanggan. Dan hal ini harus dimulai dengan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) seluruh jaringan perpipaan air minum dan data pelanggan. SIG dalam sistem ketersediaan air minum (SPAM) dapat diartikan inventarisasi seluruh data-data jaringan perpipaan dan pelanggan manual serta ketersediaan peta dasar digital. Selanjutnya, data-data tersebut di-input ke dalam aplikasi GIS untuk diolah, diedit, dan ditambahkan data-data pendukung lainnya.

Output-nya berupa informasi mengenai jaringan perpipaan dan pelanggan digital yang multifungsi. Lalu, ada penambahan kapasitas data, seperti hidrolika dan database seluruh data. Penerapan SIG dalam SPAM menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan jaringan, pemetaan aset, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam arti lain, SIG dapat membantu dalam mengendalikan operasional SPAM. Membangun SIG SPAM membutuhkan kesabaran dan konsistensi setiap penyelenggara. Sebab, update data akan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.

Keuntungan memiliki SIG SPAM adalah :

1. Pengembangan perusahaan air minum akan lebih mudah
2. Revisi dan pemutakhiran data lapangan menjadi lebih mudah
3. Data SIG SPAM menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan
4. Menjadi produk yang mempunyai nilai tambah
5. Kemampuan menukar data geospasial
6. Efisiensi waktu, energi, dan biaya operasional dalam kegiatan penurunan tingkat kehilangan air (NRW)
7. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik
8. Data SIG SPAM dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem seperti SCADA dan dengan aplikasi seperti Epanet (program perhitungan hidrolis)
9. Memecahkan permasalahan dalam bidang area wilayah yang lebih luas.

Secara simultan dalam membangun SIG SPAM, maka PDAM dapat menyiapkan dan membangun District Metering Area (DMA) pada wilayah pelayanannya. Dan hal ini dapat membantu PDAM menurunkan kehilangan air pada wilayah pelayanannya.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa untuk menurunkan kehilangan air, adalah dengan mengupayakan membangun SIG SPAM yang nantinya terintegrasi dengan sistem informasi

lainnya. Dan hal ini yang dapat mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Pringsewu. Oleh sebab itu, upaya dalam menurunkan kehilangan air non teknis adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) PDAM menjadi SDM yang unggul dan maju. Dan hal ini dimulai dengan membangun SIG dan membina SDM PDAM dalam menggunakan sistem ini.

Aplikasi SIG di PDAM digunakan untuk mengumpulkan, merevisi, mengevaluasi, dan memonitor seluruh data-data jaringan pipa, sambungan, dan aksesoris. Data-data jaringan pipa yang semula tersimpan secara manual dalam as built drawing, dengan aplikasi GIS ini, didigitasi atau di gambar ke dalam program komputer. Penggambaran letak/posisi pipa, sambungan, dan aksesoris didasarkan pada peta dasar digital dengan hasil presisi dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Mempersiapkan SDM yang kompeten untuk membangun dan menyiapkan rencana kerja yang tepat sasaran, pembuatan peta, catatan kendala, dan strategi pengembangan GIS SPAM di PDAM. Kriteria SDM antara lain adalah menguasai aplikasi GIS secara aktif, mampu melakukan kegiatan survei dan pemetaan, mampu melakukan penggambaran (digitasi) dan pemetaan, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki strategi pengembangan GIS SPAM di PDAM, serta dapat bekerja sama dalam tim.

Menyediakan fasilitas bagi SDM bagian GIS SPAM. Fasilitas yang dibutuhkan ialah personal computer (PC), server, alat survei dan pemetaan, dan router. Langkah-langkah dalam membangun GIS, diawali dengan pengumpulan data eksisting dari hasil survei lapangan. Data dapat berupa data tertulis dan data digital. Melakukan inventarisasi data eksisting dalam membangun data spasial untuk aset PDAM. Inventarisnya berupa jaringan pipa transmisi dan distribusi, aksesoris pipa, bangunan SPAM, lokasi pelanggan, dan kepuasan pelanggan, serta menganalisis data GIS SPAM.

d. Adil dan Etis

Kebijakan air dan proses perumusannya harus memiliki tujuan untuk pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan, dan agar implementasinya efektif, para pelaku atau pemangku kepentingan utama harus dilibatkan dalam proses tersebut. Aspek tata kelola cenderung bersifat tumpang tindih dengan aspek teknis dan ekonomi air, tetapi pemerintah mengarahkan kita pada elemen politik dan administratif untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Ini sejalan dengan pernyataan Rini Andalusia Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu:

“Harusnya ada sinergi, sebetulnya sudah betul PDAM dikelola pusat, sumber air kita terkhusus Kecamatan Pardasuka ada di Pesawaran dan Tanggamus. Kalau tidak kita tidak kebagian sumber air. Jadi pengolahan air tidak bisa dibicarakan sendiri. Air yang penting bagi kebutuhan pokok yaitu air minum dulu menurut undang-undang pengolahan air. Berapa kebutuhan masyarakat sedangkan sifat air tanah terbatas, Pamsimas bukan utama boleh jadi cadangan”.

Semua kalangan harus memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Terutama dalam pemenuhan air bersih. Pemerataan antara dan di antara berbagai kelompok kepentingan, pemangku kepentingan, dan pemilih konsumen perlu dipantau secara cermat selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Tata kelola air harus sangat didasarkan pada prinsip-prinsip etis masyarakat di mana air berfungsi dan berdasarkan aturan hukum. Hal ini terwujud paling kuat dalam masalah keadilan, hak kepemilikan atas penggunaan, akses, dan kepemilikan air. Kerangka hukum dan peraturan harus adil dan ditegakkan.

Tata kelola air adalah bagian dari masalah yang lebih umum dari penciptaan infrastruktur fisik dan kelembagaan suatu negara dan dari masalah kerjasama sosial yang lebih umum. Tata kelola air berkaitan dengan organisasi dan lembaga politik, sosial dan ekonomi yang penting untuk pengembangan dan pengelolaan air. Mengingat kompleksitas penggunaan air dalam masyarakat, mengembangkan, mengalokasikan dan mengelolanya secara adil dan efisien serta memastikan kelestarian lingkungan mensyaratkan bahwa suara yang berbeda patut didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan atas akses air dan penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas (Rogers dan Hall, 2003:16). Oleh sebab itu, untuk memenuhi prinsip adil atas beberapa kecamatan lain yang belum terakses oleh PDAM maka pemerintah daerah melibatkan Pamsimas sebagai penyedia air bersih di tingkat perdesaan. Sejak tahun 2017 Pemerintah Pringsewu mulai mengikuti program Pamsimas untuk ketersediaan air minum di kawasan perdesaan. Terdapat tabel yang menjabarkan desa yang terafiliasi dengan Program Pamsimas:

Tabel 2. Desa Program Pamsimas Kab. Pringsewu Tahun 2017

No.	Desa	Kecamatan
1	Gemah Ripah	Pagelaran
2	Banyu Urip	Banyumas
3	Nusa Wungu	Banyumas
4	Banyumas	Banyumas
5	Sinar Mulia	Banyumas
6	Penjerejo	Gadingrejo
7	Pamenang	Pagelaran
8	Giri Tunggal	Pagelaran Utara
9	Kedaung	Pardasuka
10	Selapan	Pardasuka
11	Margakaya	Pringsewu
12	Sinar Baru	Sukoharjo
13	Waringinsari Barat	Sukoharjo
14	Pandan Surat	Sukoharjo
15	Sukoharjo I	Sukoharjo

Sumber : *Website PAMSIMAS*, 2018

2. Pengoperasian

a. Akuntabel

Peran dalam proses legislatif dan eksekutif harus jelas. Setiap lembaga harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Namun ada juga kebutuhan akan kejelasan dan tanggung jawab yang lebih besar dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan kebijakan di tingkat mana pun. Pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik, serta kepada pemangku kepentingan kelembagaan. Akuntabilitas ini berbeda-beda tergantung pada organisasi dan apakah keputusan itu internal atau eksternal organisasi. Senada dengan yang disampaikan Araina Dwi Rustiani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu:

“Semua kita *support* terus karena PDAM kategori “sakit” jadi pelayanan belum maksimal. Pelanggannya masih belum sesuai dengan yang kita keluarkan. Harusnya sekian tapi mereka masih jauh dibawah. Karena pelayanan PDAM baru *support* dua kecamatan”

Pendapat lain disampaikan aktivis Edy Karizal yang menilai bahwa PDAM jangan berorientasi pada keuntungan melainkan fokus pada pelayanan dasar:

“PDAM kan BUMD harusnya bukan dibangun sebagai korporasi pemerintah untuk mencari untung. Dia dibangun untuk mempersiapkan dan menyediakan air bersih terutama untuk daerah yang sulit peroleh air bersih. Harusnya visi kesitu. Karena ada masalah di daerah lain yang masyarakatnya sulit”.

Mengutip Kembali pernyataan Araina Dwi Rustiani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu:

“PDAM itu langsung dibawah bupati sebetulnya, di garis strukturalnya langsung di bawah bupati tapi garis koordinasi PUPR. Fasilitas yang dikelola PDAM jaringan air bersih, instalasi air, tapi yang mengelola PDAM. . Tahun 2019 way pagasan mulai dibangun untuk solusi kecamatan lain yang belum terakses PDAM. Letaknya di register 22 untuk mengalirkan 5 kecamatan jadi SPAM perkotaan dan dikelola PDAM nantinya. Pamsimas kebanyakan dikelola masyarakat dengan sumber air tanah dan memanfaatkan mata air makanya dengan pengeboran. Jika Pringsewu di bor setiap tahun sebanyak 25 atau 21 belum masyarakat pribadi juga melakukan pengeboran. Padahal kita tau Pringsewu susah air. Jadi semakin sulit dan kering”.

Menarik kesimpulan beberapa pernyataan di atas, dapat dikatakan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu belum dapat dikategorikan akuntabel dalam memberikan pelayanan terhadap akses ketersediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu.

b. Efisien

Penting memahami bahwa sistem tata kelola tidak menghalangi tindakan, misalnya meminimalkan biaya transaksi akan sangat membantu efisiensi politik dan ekonomi terutama mengenai tarif PDAM. Menggunakan GIS SPAM yang sudah terbentuk, maka PDAM dapat memetakan asetnya yang ada, dan hal ini wajib dilakukan untuk mengetahui kondisi aset PDAM yang dimanfaatkan. Manajemen aset ini

penting oleh karena kebutuhan sarana prasarana air minum terus meningkat, dan ada keterbatasan sumber daya, oleh sebab itu dibutuhkan efisiensi dan efektif dalam penyelenggaraan SPAM di PDAM. Berbekal manajemen aset PDAM dapat mengetahui tanggal pemasangan, tanggal perbaikan, *history* perbaikannya seperti apa dan jadwal perbaikannya. Manajemen aset adalah suatu praktik usaha yang mencakup semua aspek manajemen dan operasi perusahaan air minum. Deskripsi ini sesuai dengan pernyataan Rini Andalusia, Plt. Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu:

“Karena kita sistem hitung akuntansi ada aset yang dihitung sebagai modal karena ikut menghasilkan uang. Tapi kalau dihitung sistem warung ya untung tapi dengan sistem akuntansi rugi. Kalaupun ada laba dipakai untuk menambah modal dan pengembangan PDAM sendiri.”

Manajemen aset yang baik diperlukan untuk manajemen kehilangan air secara ekonomi yang berjangka panjang dan tujuannya adalah untuk mengatasi kehilangan air dengan cara yang paling efektif dari segi biaya. Hal ini memerlukan penetapan prioritas dan pengambilan keputusan-keputusan tentang kapan akan melakukan perbaikan, penggantian, rehabilitasi, membiarkan asset apa adanya secara bersamaan, menerapkan pengelolaan tekanan, serta memperbaiki program operasi dan perbaikan. Manajemen aset adalah upaya untuk mengefektifkan investasi dan efisiensi dalam operasional. PDAM “Way Sekampung” harus memulai dan menerapkan manajemen aset secara berkelanjutan dan tidak perlu melihat jumlah sambungan baru sedikit, tapi justru harus dimulai dari hal yang kecil agar menjadi PDAM yang sehat.

c. Responsif dan Berkelanjutan

PDAM sebagai institusi yang bertanggungjawab mengelola air bersih di Kabupaten Pringsewu selayaknya bertindak responsif dalam menjalankan pemenuhan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat. Sejatinnya permasalahan teknis berangkat sebelum Kabupaten Pringsewu berpisah dari kabupaten induknya Kabupaten Tanggamus, yang sebenarnya telah memiliki jaringan perpipaan air minum yang dikelola oleh PDAM Way Agung Kabupaten Tanggamus. Jumlah sambungan rumah (SR) yang ada di wilayah Sub PDAM Pringsewu yang pernah tercatat adalah 1772 sambungan tersebar di 4 kecamatan: Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo dan Banyumas. Dalam prakteknya jumlah tersebut mengalami pasang surut sampai akhirnya PDAM Pringsewu berhenti beroperasi pada bulan Agustus 2010 saat terjadinya pemisahan aset dengan PDAM Way Agung Tanggamus. Jumlah pelanggan PDAM Sub Cabang dari PDAM Induk Kabupaten Tanggamus sebelum terjadi pemekaran wilayah tahun 2008, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Kondisi Sumber Air Bersih PDAM Kabupaten Pringsewu Tahun 2007

No	Cabang	Banyaknya Pelanggan	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Banyaknya Air yang Disalurkan (m3)
1	Sukoharjo	276	3204	47.112
2	Pringsewu	1.224	13890	160.128
3	Gadingrejo	72	1788	817
	Jumlah	1.572	18.882	208.057

Sumber : Tanggamus dalam Angka, BPS (2008)

Masalah yang ada antara lain dalam pendistribusian airnya ke pelanggan mengalami banyak kehilangan air yang disebabkan kebocoran pada pipa-pipa yang telah tua usianya. Sedangkan kondisi sumber air baku di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Pringsewu sebagian memiliki permasalahan serius khususnya di musim kemarau. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi SPAM non perpipaan yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang secara dominan memanfaatkan air tanah (sumur gali) dalam sebagai sumber air baku. Hal ini didukung pendapat Almaidah Fasilitator Pamsimas Kabupaten Pringsewu yang mengutarakan bahwa Pamsimas selama ini berupaya mencari sumber mata air gravitasi. Namun betul faktanya lebih banyak yang melakukan pengeboran.

Pengambilan air tanah secara terus menerus dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih di kecamatan Gadingrejo dan beberapa kecamatan lain menyebabkan penurunan casing dan rusaknya bangunan sumur bor. Hal ini di diatasi sementara dengan menyambung jaringan pipa Gadingrejo ke jaringan pipa Pringsewu. Pendapat sama juga disampaikan Araina Dwi Rustiani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu yang kontra terhadap pengambilan air tanah seperti yang dilakukan Pamsimas:

”Animo masyarakat mereka ngebor sendiri membuat sendiri nanti kalau sudah berjalan tidak sampai 5 tahun udah gerah. Sumber airnya kurang kualitasnya bau FE tinggi bornya 80m. kalau daerah sana 80m baru dapet air. Tergantung geografisnya. Bupati menyampaikan sumber air permukaan dari register itu. Sudah dari 2015 sudah sosialisasi”.

Namun, pendapat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu bertolak belakang dengan Tim Pamsimas yang menyatakan justru air tanah sebagai solusi tercepat ketersediaan air bersih bagi daerah yang belum mampu difasilitasi oleh PDAM sedangkan masyarakat membutuhkan air segera tanpa menunggu kejelasan kapan PDAM masuk ke wilayah mereka terutama desa.

Semua kondisi tersebut harus segera dibenahi agar pertumbuhan kota dapat berjalan sesuai rencana dan proses pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah kota dapat terwujud. Tentunya pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan juga prioritas wilayah pembangunan agar investasi pembangunan menjadi tepat sasaran. Sebab pelayanan air bersih merupakan bisnis yang tidak murah. Perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan dapat menyebabkan perlunya penambahan pendapatan dari tarif (Rochmah, 2013:8)

Selain pemerintah daerah perlu memenuhi ketersediaan aksesibilitas air bersih, penting juga menjaga ketersediaan sumber air baku dan menjaga ketersediaan air tanah agar tidak habis. Oleh sebab itu, peran serta fungsi PDAM sebagai operator yang menjalankan proses produksi, operasional serta distribusi diharapkan mampu menjembatani aksesibilitas air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu terkhusus optimal untuk Kecamatan Pringsewu dan Gadingrejo. Menyusul berfungsinya Way Pagasan untuk kecamatan lain yang belum terakses PDAM secara utuh.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola air bersih di Kabupaten Pringsewu masih terkendala infrastruktur yang kurang memadai, cakupan layanan yang terbatas, dan rendahnya kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat regulasi, meningkatkan investasi infrastruktur, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Kolaborasi lintas sektor, adopsi teknologi modern, serta evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tata kelola air bersih di Kabupaten Pringsewu, perlu dilakukan penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan air bersih yang berkelanjutan, termasuk perlindungan sumber air dari pencemaran. Peningkatan investasi pada infrastruktur distribusi dan pengolahan air sangat diperlukan, khususnya untuk memperluas akses ke wilayah yang belum terlayani. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi dan program pemberdayaan, seperti pelatihan konservasi air dan pengelolaan limbah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan BUMD, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan tata kelola yang sinergis. Selain itu, penerapan teknologi modern untuk pemantauan kualitas air dan distribusi dapat meningkatkan efisiensi layanan, sementara evaluasi berkala terhadap kebijakan dan operasional pengelolaan air penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Bibliografi

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2008*. Tanggamus
- Kusumah, R.I. dan Mustofa, M.U. 2020. "Kajian Teoritis Water Governance untuk Pengelolaan Air Di Indonesia". *Jurnal JISIPOL*. Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 4, Nomor 1, April 2020. (29-51)
- Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu Tahun 2017
- Nur, dkk. 2018. "Analisis Pelayanan Publik Yang Pro Poor Pada Ketersediaan Air Bersih Perpipaan". *Jurnal Mega Aktiva*. Volume 7, Nomor 1, April 2018.
- Rogers. P. dan Hall A.W. 2003. *Effective Water Governance*. Swedia. Global Water Partnership.
- Rochmah, S. 2013. *Responsivitas Pelayanan: Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih*. Malang. Universitas Brawijaya Press.
- <https://pamsimas.org/>